

BAB III

PERAN DAN IMPLEMENTASI GRANT ASSISTANCE FOR GRASSROOTS HUMAN SECURITY PROJECT (GGP) DI INDONESIA

Sebagai salah satu negara berkembang dan juga mitra ekonomi dengan Jepang, Indonesia memiliki kerjasama ekonomi dengan Jepang melalui Bantuan Pembangunan Resmi / *Official Development Assistance* (ODA). Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, namun untuk mempertahankan kestabilan ekonomi tersebut baik jangka menengah maupun jangka panjang, Indonesia dituntut harus bisa mengatasi berbagai masalah kesenjangan ekonomi terutama ketimpangan pendapatan masyarakat didalam negeri. JICA pertama kali memperkenalkan skema GGP pada tahun 1997 sebagai bagian dari dukungan untuk Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi darurat pada saat itu sesuai dengan meningkatnya peran NGO sebagai salah satu aktor pembangunan penting di Indonesia, dikarenakan NGO lebih mengentahui permasalahan akar rumput di tiap daerah yang menjadi basis mereka.

Fokus pemberian skema GGP harus sejalan dengan isu prioritas dari program kerjasama JICA sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi penegentasan masalah keamanan manusia yang ada di Indonesia. Pada tahun anggaran 2017 jepang mengeluarkan Bantuan Hibah untuk Proyek Keamanan Manusia Akar Rumput / *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project* (GGP) sebesar Rp 6,353 miliar untuk 7 proyek yang tersebar di Indonesia dengan latar belakang isu yang berbeda. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada salah satu proyek yang ada di Bangka-Belitung.

A. GGP di Indonesia

Sebenarnya pemberian skema GGP yang ada di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki kerjasama ODA dengan Jepang. Secara umum skema Bantuan Hibah untuk Proyek Keamanan Manusia Akar Rumput (GGP) dari Pemerintah Jepang dapat disebut sebagai program pemberdayaan masyarakat yang dibawah naungan Japan International Cooperation Agency (JICA). Bantuan ini menargetkan masyarakat di tingkat akar rumput secara langsung melalui kerja sama dengan lembaga non profit lokal (NGO, LSM, CBO, sekolah, rumah sakit dan asosiasi nonprofit lainnya) berdasarkan persetujuan pemerintah penerima. JICA pertama kali memperkenalkan skema GGP pada tahun 1997 sebagai bagian dari dukungan untuk Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi darurat pada saat itu sesuai dengan meningkatnya peran NGO sebagai salah satu aktor pembangunan penting di Indonesia, dikarenakan NGO lebih mengentahui permasalahan akar rumput di tiap daerah yang menjadi basis mereka (JICA, n.d.).

Skema GGP adalah program baru yang dikembangkan sebagai bagian dari pengenalan JICA tentang pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi pada orang, dan dirancang khusus untuk bekerja dengan lembaga non profit lokal (NGO, LSM, CBO, sekolah, rumah sakit dan asosiasi nonprofit lainnya) berbasis akar rumput di negara-negara penerima. GGP beroperasi dengan memberikan dana langsung ke lembaga penerima selama maksimal tiga tahun. Lembaga non profit lokal pada gilirannya diharapkan untuk mengimplementasikan program-program yang menghasilkan perubahan positif dalam standar kehidupan dan kesejahteraan umum masyarakat di tingkat lokal. Lembaga non profit lokal digunakan untuk memberikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan pandangan untuk meningkatkan kapasitas pengembangan masyarakat itu sendiri. Lembaga non profit lokal berperan sebagai perantara yang ditunjuk untuk GGP karena mereka dipandang lebih mengentahui permasalahan

akar rumput di tiap daerah yang menjadi basis mereka serta yang paling terbiasa dengan budaya lokal, adat istiadat dan kondisi, dan posisi terbaik untuk memberikan hasil yang paling efektif (Maxim, 2001, pp. 13-15).

Secara keseluruhan, program ini mencontohkan pengembangan lebih lanjut dari pencarian Kementerian Luar Negeri Jepang untuk prinsip-prinsip bantuan baru, termasuk minat untuk bekerja dengan lembaga non profit lokal. Kementerian Luar Negeri Jepang mulai memberikan dukungan kepada lembaga penerima lokal pada akhir 1980-an melalui Dana Bantuan NGO, yang memberikan dana kepada NGO Jepang untuk melakukan program bantuan di luar negeri, dan program Hibah Akar Rumput, yang menyediakan dana untuk LSM di negara-negara berkembang melalui kedutaan besar Jepang di luar negeri. Dalam (Maxim, 2001, pp. 13-15) tujuan GGP adalah untuk "meningkatkan mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di tingkat akar rumput," dan dengan demikian menargetkan bidang-bidang berikut:

- a. Pengembangan masyarakat
- b. Dukungan untuk orang cacat, lansia dan anak-anak
- c. Peningkatan kesehatan masyarakat
- d. Pemberdayaan perempuan
- e. Pembangunan infrastruktur
- f. Pengembangan sumber daya manusia
- g. Promosi industri lokal

Seiring dengan perubahan umum dalam kebijakan Kementerian Luar Negeri Jepang yang telah menghasilkan lebih banyak perhatian kepada lembaga non profit lokal, Jepang percaya bahwa banyak dari perubahan yang mengarah pada penciptaan GGP setidaknya dapat menjadi idealis dalam JICA yang menginginkan peran konstruktif di dunia. GGP adalah bagian dari gambaran yang lebih besar tentang jenis-jenis program yang secara keseluruhan dipandang penting oleh JICA. Karenanya karyanya tidak terkait dengan program-program lain yang dijalankan JICA, tetapi lebih penting dari pusat di dalam

agensi, termasuk bagaimana ia diterjemahkan secara langsung ke masing-masing negara (Maxim, 2001, pp. 13-15).

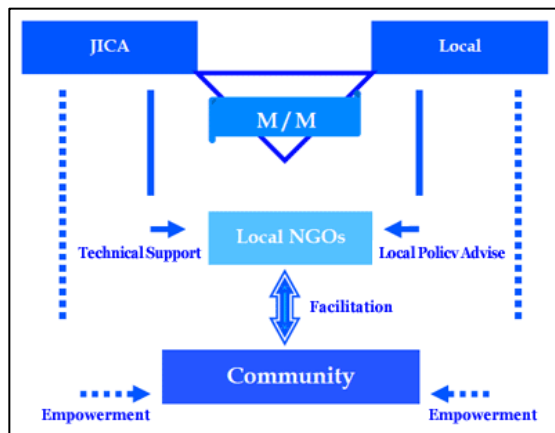
GGP yang diimplementasikan oleh lembaga non profit lokal bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan membantu mereka dalam membangun kapasitas mata pencaharian yang mandiri serta peningkatan kesejahteraan untuk kontribusi lebih lanjut dalam meningkatkan ekonomi lokal dan pembangunan sosial untuk mengurangi kemiskinan. Fokus pengembangannya harus sejalan dengan isu prioritas dari program kerjasama JICA di Indonesia, yang saat ini ditekankan pada hal-hal berikut:

- a. Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (yaitu promosi industri lokal)
- b. Pengentasan kemiskinan (kesehatan, pendidikan, air & sanitasi, penghidupan masyarakat)
- c. Pembangunan daerah (seperti Pembangunan kembali masyarakat)
- d. Pelestarian lingkungan (perlindungan lingkungan alam, keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup)
- e. Dukungan darurat cepat yang memiliki dampak khusus terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Lembaga penerima yang memenuhi syarat dengan ide bagus dalam mempromosikan pemberdayaan masyarakat harus mengirimkan proposal proyek mereka langsung ke Kedutaan besar Jepang di Jakarta dengan "Surat Rekomendasi" dari lembaga pemerintah daerah yang berwenang terkait dengan situs dan ruang lingkup proposal proyek. Proposal harus menyebutkan dengan jelas tujuan, sasaran, komunitas mitra target proyek, lokasi, ruang lingkup pembangunan, pendekatan pengembangan strategis, dan lembaga pemerintah daerah mitra. Pemeriksaan proposal akan dilakukan setiap tahun berdasarkan kriteria persyaratan serta pertimbangan pada program prioritas yang sedang berlangsung, yang tercermin dalam ketersediaan anggaran sebelum dimulainya Tahun Anggaran Jepang (JFY) pada bulan April (JICA, n.d.).

Setelah proposal dikategorikan sebagai proyek prospektif, Kedubes Jepang dan lembaga penerima masing-masing merancang formulasi proyek. Proyek yang dipilih kemudian akan dikirim oleh ke lembaga Pemerintah Indonesia yang berwenang (Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Biro Kerjasama Teknis Asing) untuk mendapatkan persetujuan resmi bagi keseluruhan implementasi proyek. Oleh karena itu, "Risalah Rapat" (M / M) harus disimpulkan oleh JICA, LSM masing-masing, dan lembaga pemerintah daerah terkait, sebagai referensi dasar untuk membuat kontrak tahunan antara JICA Indonesia dan Lembaga Penerima terkait (JICA, n.d.).

Tabel 3.1 Alur Skema GGP di Indonesia



Sumber :

(<https://www.jica.go.jp/indonesia/english/activities/activity06.html>)

Proyek dilaksanakan berdasarkan kontrak tahunan yang disepakati di bawah periode Tahun Anggaran Jepang (April - Maret), dan dapat diperpanjang setiap tahun untuk periode total maksimum 3 (tiga) tahun sesuai dengan hasil evaluasi. Pemerintah Jepang akan menyediakan biaya yang diperlukan oleh masing-masing lembaga penerima berdasarkan anggaran yang disetujui untuk pengeluaran seperti penyediaan *asset material* (bahan & peralatan mesin) untuk mendukung

masyarakat. Sementara itu, masing-masing Lembaga Penerima akan memobilisasi sumber daya manusia dan kapasitas pengetahuan untuk mulai bekerja di lapangan sebagai fasilitator dalam memberdayakan serta membantu penerima manfaat dan masyarakat target dalam memperkuat kapasitas mereka serta membangun kemandirian untuk mata pencaharian dan kesejahteraan inisiatif lokal mereka (JICA, n.d.). lembaga penerima yang berperan sebagai mitra lokal Kedubes Jepang harus mengimplementasikan GGP berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati, yaitu:

- a. Pendekatan Partisipatif: Kelompok masyarakat sasaran harus sangat didorong untuk berpartisipasi dalam proyek
- b. Transparansi: Setiap modifikasi pelaksanaan proyek harus mendapat informasi dengan baik; aktif dalam hubungan masyarakat
- c. Akuntabilitas: Pelaporan pemanfaatan keuangan, audit
- d. Ramah Lapangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal: Semua kegiatan harus dipertimbangkan berdasarkan situasi lokal, tradisi dan nilai-nilai, termasuk identifikasi mesin yang diperlukan juga harus dipelihara dan diperbaiki secara lokal
- e. Keberlanjutan: Kegiatan proyek harus berkelanjutan di masyarakat bahkan setelah selesai
- f. Membangun Kemitraan: Semua pemangku kepentingan berusaha keras untuk bekerja bersama dan saling mendukung

GGP menawarkan JICA cara baru untuk mendistribusikan bantuan yang merupakan pemutusan dari pola teknokratis dan birokrasi di masa lalu. Ini memberikan mekanisme dimana bantuan dana dapat dipindahkan untuk mendukung kegiatan tingkat lokal dan mempromosikan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini berarti bahwa orang menerima manfaat dari bantuan pembangunan asing dengan cara yang langsung dapat diukur dan terlihat (Maxim, 2001, p. 32).

GGP secara langsung dapat disebut sangat membantu masyarakat setempat karena membuat JICA lebih bertanggung jawab di dalam negara penerima secara umum, juga kepada masyarakat Jepang. Ini memberikan perspektif yang lebih manusiawi dalam kerja ODA Jepang, dengan program yang tidak hanya bertindak sebagai dukungan kebijakan untuk sektor swasta Jepang melalui program bantuan berorientasi infrastruktur. GGP menunjukkan bahwa JICA, dan lembaga ODA lainnya, dapat menjangkau lebih dari sekadar kerja sama umum antar pemerintah-ke-pemerintah untuk terhubung dengan mitra baru, termasuk NGO dan CSRO. Mitra baru ini, pada gilirannya, karena mereka berorientasi pada akar rumput, lebih mampu menanggapi kebutuhan lokal daripada apa yang telah ditunjukkan secara umum dalam proyek-proyek ODA di tingkat nasional (Maxim, 2001, p. 32).

Bagaimanapun peran GGP sangat penting dalam mengamankan dukungan pemerintah nasional yang bersangkutan dari masyarakat sipil dan organisasi masyarakat adat untuk mewujudkan program tersebut. Kemajuan GGP di Indonesia sangat membantu Jepang untuk memperoleh pengetahuan dan pemahamannya tentang budaya birokrasi Indonesia. Kerja GGP dengan lembaga non profit lokal di tingkat akar rumput menawarkan manfaat langsung kepada masyarakat lokal yang dapat mengarah pada perubahan langsung dalam cara mereka menjalani kehidupan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan pemerintah dan kekuatan pasar. Implementasi skala yang lebih besar menjanjikan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal di Indonesia, yang layak disajikan sebagai model ODA bilateral dan multilateral lainnya. Program semacam itu juga menawarkan cara untuk mewujudkan masyarakat sipil yang lebih kuat di Indonesia secara keseluruhan, yang dapat membantu dalam proses konsolidasi demokrasi yang telah berlangsung (Maxim, 2001, p. 32).

3. Hasil kerjasama yang diharapkan melalui GGP

Dalam rincian kebijakan jangka menengah Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) dari Pemerintah Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2005) melalui kerjasama bantuan asing termasuk Bantuan Hibah untuk Proyek Keamanan Manusia Akar Rumput (GGP) yang dibangun antara Pemerintah Jepang dengan negara penerima bantuannya diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat agar bantuan yang diberikan bisa berjalan efektif dalam membantu pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di negara penerima tersebut. Beberapa manfaat yang diharapkan antara lain, yaitu:

(i) Penciptaan lapangan kerja

Meningkatkan pendapatan melalui pekerjaan adalah sarana penting untuk meningkatkan standar hidup masyarakat bawah khususnya pada pengembangan usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) padat karya. Bantuan juga akan diberikan untuk pengembangan infrastruktur ekonomi yang fundamental untuk kegiatan industri, reformasi lembaga, dan peningkatan kondisi tenaga kerja dalam mempromosikan partisipasi usaha mikro dan memperluas investasi dalam dan luar negeri.

(ii) Pembangunan yang seimbang

Biasanya negara-negara yang sedang dalam masa pembangunan ekonomi juga menghadapi masalah kesenjangan. Kesenjangan ini terjadi pada banyak kasus antara daerah pedesaan yang miskin dan daerah perkotaan yang relatif makmur. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan. Jepang akan mendukung perumusan kebijakan terkait potensi daerah seperti pertanian, perikanan dan lainnya melalui peningkatan infrastruktur seperti irigasi dan jalan pertanian, diseminasi dan penelitian / pengembangan teknologi produksi dan penguatan organisasi masyarakat sehingga bantuan yang telah diberikan bisa mendorong kegiatan ekonomi di daerah pedesaan, seperti

pengolahan produk pertanian, perikanan, pengembangan distribusi pasar dan penjualan bahan makanan.

(iii) Pertumbuhan berkelanjutan

Jepang juga akan berusaha memastikan bahwa bantuannya bisa memberikan hasil pembangunan yang berkelanjutan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Karena penduduk miskin sering bergantung langsung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka dan karena itu sangat rentan terhadap dampak degradasi lingkungan. Oleh karena itu, perhatian penuh akan diberikan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan melalui pembangunan ekonomi.

B. 7 GGP di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2017 pemerintah Jepang

Menurut laporan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dalam situs resminya, pada tahun 2018, Jepang mengeluarkan bantuan hibah grassroots sebesar Rp 6,353 miliar untuk 7 proyek dalam tahun anggaran 2017 (tahun anggaran Jepang di mulai pada bulan April hingga akhir Maret di tahun berikutnya) yang tersebar di Indonesia dengan latar belakang isu yang berbeda. Adapun para penerima hibah tersebut yaitu Ponpes Darul Ulum untuk pembangunan pondok pesantren di Desa Bojong kulon sebesar Rp 1,183,000,000, NU Kendal untuk pembangunan SMA di Kabupaten Kendal sebesar Rp 530,775,419, Institusi Penelitian & Pengembangan Masyarakat untuk Pengadaan generator biogas dan fertilizor pupuk cair di sekitar danau Tempe sebesar Rp 776,000,000, Yayasan Pendidikan Tunas Harapan Kupang untuk pembangunan SMA di Kelurahan Manutapen sebesar Rp 998,820,000, Yayasan Alam Sehat Lestari untuk proyek pengadaan mobil ambulance di Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp 996,550,000, Karya Muda Belitung untuk pengadaan mesin pengering bagi masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk, Pulau Belitung sebesar Rp 717,000,000 dan Wahana Visi Indonesia untuk

Pembangunan Fasilitas Sekolah Dasar di Pulau Biak sebesar Rp 1,150,989,627 (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, n.d.).

Gambar 3.1 Peta GGP di Indonesia untuk tahun anggaran Jepang 2017



(sumber : https://www.id.emb-japan.go.jp/news18_04.html)

1. Proyek Pembangunan Asrama di Pondok Pesantren di Desa Bojong Kulon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Yayasan Pendidikan Islam (YPI) mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp 1,183,000,000 dari pemerintah Jepang melalui skema GGP untuk bidang Pendidikan. Bantuan ini digunakan untuk membangun Pesantren Darul Ulum di Desa Bojong Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Rincian pembangunan dalam proyek ini yaitu membangun 2 tingkat gedung baru yang digunakan untuk membuat 4 asrama, ruang kelas, ruang perawatan, dapur, dan 9 toilet sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar-mengajar di sekolah serta memberikan kenyamanan terhadap kehidupan para santri yang tinggal di Pondok

Pesantren Darul Ulum terutama santri dari kalangan yatim dan duafa. Selain itu, bantuan ini juga akan berdampak pada kesejahteraan para santri seperti pembekalan keterampilan untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berpendidikan, beriman dan mandiri (Mina News, 2018).

2. Proyek Pengadaan Generator Biogas dan Fertilizor Pupuk Cair di Sekitar Danau Tempe, Kabupaten Wajo,Provinsi Sulawesi Selatan

Danau Tempe merupakan sebuah danau purba yang terletak di Kabupaten Wajo,Provinsi Sulawesi Selatan. Hampir seluruh permukaan Danau Tempe dipenuhi oleh tumbuhan eceng gondok sehingga menjadikan danau ini kaya akan ekosistemnya. Namun sayangnya ketika musim hujan tiba, tumbuhan eceng gondok tersebut menimbulkan masalah bagi masyarakat yang bermukim di sekitar Danau Tempe, pasalnya ketika volume air danau pasang, tumpukan eceng gondok sering ikut hanyut membanjiri pemukiman masyarakat di sekitar danau. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang harus rela menyaksikan rumahnya rusak akibat gempuran oleh tumpukan enceng gondok tersebut. Bila kondisi ini dibiarkan secara terus menerus tanpa adanya penanganan maka siklus masalah tersebut akan terulang kembali (CitizenReporter, 2018).

Melihat permasalahan tersebut, Institusi Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (IPPM) memiliki inovasi untuk mengubah masalah menjadi peluang usaha yaitu dengan memanfaatkan enceng gondok di Danau Tempe menjadi biogas dan pupuk cair organik. Dalam menerapkan inovasinya, IPPM bekerjasama dengan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia melalui skema GGP untuk mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp 776,000,000. Dengan bantuan hibah tersebut, IPPM akan menyediakan mesin generator biogas berkapasitas besar untuk membuat Fertilizer Pupuk Cair menggukan tumbuhan enceng gondok yang tumbuh subur di Danau Tempe. Lalu dengan adanya proyek ini, IPPM juga mengadakan sosialisasi dan pelatihan teknis kepada masyarakat di sekitar Danau Tempe

untuk mengelola dan merawat mesin Generator Biogas yang telah disediakan (Halo Sulsel, 2018)

Menurut pihak IPPM, pelaksanaan dari program ini akan menghasilkan tiga substansi. *Pertama*, dapat membangun kepedulian, kesadaran masyarakat dan stakeholder setempat untuk mengelola ekologi kawasan Danau Tempe agar tetap berkelanjutan. *Kedua*, meningkatkan produktifitas masyarakat melalui keterampilan teknis dalam mengolah tumbuhan eceng gondok menjadi biogas dan pupuk organik yang bernilai ekonomi. *Ketiga*, melalui program pemanfaatan tumbuhan eceng gondok, koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder setempat akan terbentuk. Selain itu, secara tidak langsung program ini akan berdampak pada perluasan wilayah Danau Tempe yang selama ini tertutupi oleh tumbuhan eceng gondok sehingga masyarakat disekitar bisa menangkap ikan dan meningkatkan produktivitas pertanian dengan mudah (CitizenReporter, 2018).

3. Proyek Pengadaan Mobil Ambulance di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat

Terdapat berbagai masalah ketika akses infrastruktur di Kabupaten Kayong Utara yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat sedang dalam proses pengembangan, misalnya seperti akses layanan medis yang sangat sulit menjangkau masyarakat di kabupaten tersebut. Bahkan bila menggunakan mobil saja dibutuhkan waktu kurang lebih dua jam bagi pasien cedera dengan serius untuk menempuh perjalanan ke layanan medis di Kabupaten Ketapang yang fasilitasnya lebih lengkap dari pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Kayong Utara yang masih sangat minim. Melihat permasalahan tersebut, Yayasan Alam Sehat Lestari di Kabupaten Kayong Utara memiliki inisiatif untuk mengatasi permasalahan ini yang bekerjasama Kedutaan Besar Jepang di Indonesia melalui skema GGP di bidang layanan kesejahteraan/ sosial dengan nama proyek yaitu "Project for Providing An Ambulance." Pada tahun anggaran 2017 pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besarnya di Indonesia memberikan bantuan hibah kepada Yayasan Alam

Sehat Lestari sebesar Rp 996,550,000 untuk menyediakan mobil ambulance di klinik ASRI, Provinsi Kalimantan Barat sebagai sarana akses transportasi Unit Gawat Darurat demi memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat di Kayong Utara (Arisandy, 2018).

Dengan adanya proyek ini masyarakat di Kabupaten Kayong Utara cukup terbantu ketika dalam keadaan darurat maupun ingin merujuk ke rumah sakit dengan cepat dan lancar. Bantuan hibah yang diberikan ternyata juga selaras dengan visi pemkab Kayong Utara untuk lima tahun ke depan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama melalui pengadaan mobil ambulance tersebut (Rizal, 2018).

4. Proyek Pembangunan Fasilitas Sekolah Dasar di Pulau Biak, Provinsi Papua

Sebagai bentuk kepedulian untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Wilayah Timur Indonesia. Wahana Visi Indonesia (WVI) berinisiatif untuk melakukan renovasi fasilitas pendidikan dan penerapan model sekolah ramah anak di SD Inpres Amparu di Desa Andei, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. WVI melakukan kerjasama dengan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia melalui skema GGP untuk bidang pendidikan. Kedutaan Jepang memberikan bantuan hibah sebesar Rp 1,150,989,627 kepada WVI yang akan digunakan untuk merenovasi tiga gedung sekolah, pengadaan kursi dan meja serta membangun empat toilet di SD Inpres Amparu. Selain itu, WVI akan mengadakan sosialisasi tentang tata cara mengajar yang baik bagi guru dan pentingnya pendidikan bagi orang tua murid (Ariyanto, 2017). Dengan adanya proyek ini, kualitas dan standar pendidikan yang ada di SD Inpres Amparu semakin meningkat dan orang tua murid juga sadar akan pentingnya pendidikan sehingga akan berdampak baik dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa yang ada di Pulau Biak, Papua (Analisa Publik, 2018).

5. Proyek Pembangunan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

NU Kendal melakukan kerjasama dengan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia untuk membangun sarana pendidikan di lingkungan Nahdatul Ulama (NU) di Kendal. Kedutaan Jepang memberikan bantuan hibah sebesar Rp 530,775,419 merenovasi dua ruang kelas untuk Lab IPA dan perpustakaan serta pembangunan dua ruang kelas baru di MTs 22 Singorojo Desa Singorojo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah sehingga siswa-siswi yang ada didalamnya bisa belajar dengan aman dan nyaman sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Proyek ini juga sejalan dengan tiga program prioritas NU yaitu dibidang pendidikan, perekonomian dan kesehatan (Mina News, 2018).

6. Proyek Pembangunan Sekolah Menengah Atas di Kelurahan Manutapen, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Sebelum dilaksanakannya proyek ini siswa-siswi di SD,SMP,SMA yang dikelola oleh Yayasan Tunas Harapan Kupang di Kelurahan Manutapen Kelurahan Manutapen, Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami masalah dalam kegiatan belajar-mengajar yang buruk yaitu mereka hanya memiliki waktu belajar kurang efisien karena ketersediaan ruang kelas dan sarana-prasarana yang kurang memadai. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kupang, Yayasan Pendidikan Tunas Harapan Kupang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia melalui skema GGP untuk merenovasi sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan yayasan tersebut. Kedutaan Jepang memberikan bantuan Hibah sebesar Rp 998,820,000 untuk merenovasi SD, SMP, SMA Yayasan Pendidikan Tunas Harapan Kupang. Proyek ini akan membangun satu Gedung baru untuk tiga kelas di SMA dan pengadaan meja, kursi, dll sebagai sarana atau fasilitas untuk

meningkatkan kualitas pendidikan di Kupang (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2018)

7. Proyek Bantuan untuk Nelayan di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung

Proyek hibah grassroots ini dilakukan oleh Pemerintah Jepang melalui kedutaan besarnya di Indonesia yang bekerja sama dengan Karya Muda Belitung di bidang perikanan. Lokasi proyek berada di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung. Sebenarnya proyek ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir tersebut untuk meningkatkan kapasitas industri mikro ikan asin dan olahan lainnya agar menjadi produk unggulan bagi daerah.

Proyek ini merupakan usulan dari perkumpulan Karya Muda Belitung (KMB) yang berinisiatif untuk bekerjasama dengan Kedubes Jepang di Indonesia melalui bantuan hibah yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang dalam skema “*Grant Assistance for Grassroots Human Security Project*” (GGP). Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah keamanan ekonomi pada masyarakat pesisir yang memiliki industri ikan asin dan olahan kering lainnya di Kecamatan Sijuk. Hal ini dikarenakan metode industri yang masih bersifat tradisional dengan ketergantungan terhadap cuaca yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas produk serta nilai jualnya di pasaran sehingga berdampak pada pendapatan yang tidak stabil bagi masyarakat pesisir tersebut. Kegiatan utama proyek ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan produksi kepada masyarakat pesisir di 6 desa pada Kecamatan Sijuk melalui pengadaan aplikasi teknologi tepat guna berupa mesin pengering yang akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang akan dihasilkan. Sehingga dengan adanya agenda ini diharapkan bisa berdampak besar bagi masyarakat pesisir tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi mereka.

Perlu diketahui bahwa dari 7 proyek pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Jepang, hanya proyek yang ada di

Belitung menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Penulis akan membahas proyek ini secara detail berdasarkan skema kerjasama yang sudah dibangun antara Karya Muda Belitung dan Kedubes Jepang dalam mengimplementasikan GGP. Jadi, penelitian ini hanya akan berfokus pada peran GGP dalam mengatasi keamanan ekonomi terhadap masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.